



DAMPAK TARIF PROTEKSIONIS AS ERA TRUMP DAN DINAMIKA HUKUM INVESTASI TERHADAP PROSPEK EKONOMI INDONESIA

THE IMPACT OF US PROTECTIONIST TARIFFS DURING THE TRUMP ERA AND THE DYNAMICS OF INVESTMENT LAW ON INDONESIA'S ECONOMIC PROSPECTS

Muhamad Nur Ismail¹, Andreas Agustinus², Jimmy Kurniawan³, Liliek Kristianti⁴, Lousia Hariat Ngion⁵, Natalia Catur Wulansari⁶, Nicholas Yunix⁷, Sutedjo⁸, Vayla Eunique Yvonne Palilingan⁹, Virawaty¹⁰, Yustinus Taruna¹¹

Universitas Bung Karno

Email: mni2017cpa@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 13-08-2025

Revised : 15-08-2025

Accepted : 17-08-2025

Published : 20-08-2025

Abstract

The protectionist tariff policy imposed by the United States during the Trump era has increased uncertainty in the global economy and significantly impacted Indonesia's economy. This study aims to analyze the impact of U.S. tariff policies and the dynamics of domestic investment regulations on Indonesia's economic growth prospects after 2025. By using a mixed approach, namely quantitative general equilibrium model (CGE) simulation and qualitative comparative analysis of investment regulations, this study finds that high tariff policies are likely to suppress exports from Indonesia's labor-intensive sectors, such as textiles, footwear, furniture, and palm oil. Furthermore, these tariffs may lead to the relocation of foreign direct investment (FDI) to countries with lower tariff policies, such as Vietnam and Malaysia, thereby increasing the risk of domestic economic contraction. The simulation results indicate that Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) growth remains relatively moderate, around 4.7%–5.0% per year, provided that domestic consumption and domestic investment remain strong. However, the potential decline in Foreign Direct Investment (FDI) of 10%–20% due to investment relocation is estimated to cut additional economic growth by about 0.5%–1.2%. Therefore, this study recommends regulatory reforms for investment, diversification of export markets, proactive economic diplomacy, as well as strengthening the domestic sector and accommodative policies to mitigate the negative impacts of the US protectionist tariff policies.

Keywords: *US trade war, import tariffs, foreign direct investment*

Abstrak

Kebijakan tarif proteksionis yang diberlakukan Amerika Serikat pada era Trump telah meningkatkan ketidakpastian dalam ekonomi global dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif AS serta dinamika regulasi investasi domestik terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan campuran, yaitu simulasi model keseimbangan umum (CGE) secara kuantitatif dan analisis komparatif regulasi investasi secara kualitatif, studi ini menemukan bahwa kebijakan tarif tinggi berpotensi menekan ekspor sektor padat karya Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan sawit. Lebih jauh, tarif tersebut juga dapat menyebabkan relokasi investasi asing langsung (PMA) ke negara-negara dengan kebijakan tarif lebih rendah seperti Vietnam dan Malaysia, sehingga memperbesar risiko kontraksi ekonomi domestik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih



relatif moderat, sekitar 4,7%–5,0% per tahun, dengan syarat konsumsi dalam negeri dan investasi domestik tetap kuat. Namun, potensi penurunan PMA sebesar 10%–20% akibat relokasi investasi diperkirakan akan memangkas tambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,5%–1,2%. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi investasi, diversifikasi pasar ekspor, diplomasi ekonomi proaktif, serta penguatan sektor domestik dan kebijakan akomodatif untuk memitigasi dampak negatif kebijakan tarif proteksionis AS tersebut.

Kata kunci: Perang dagang AS, tarif impor, investasi asing langsung

PENDAHULUAN

Sejak Januari 2025, pemerintahan Presiden Trump menerapkan kebijakan tarif tambahan (“Liberation Day Tariffs”) hingga 32% atas barang impor dari Indonesia dan lebih dari 60 negara lainnya. Kebijakan ini menimbulkan keprihatinan karena dapat merusak tatanan perdagangan internasional yang sudah rentan [1]. Pengenaan tarif tinggi berpotensi menurunkan daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS, sehingga eksportir akan mempertimbangkan relokasi pabrik perakitan ke negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, atau Meksiko yang menikmati perlakuan tarif lebih ringan.

Dalam struktur PDB Indonesia 2021–2024, porsi konsumsi rumah tangga sangat dominan (sekitar 57%–61%), diikuti investasi (29%) dan ekspor bersih (19%–20%). Ekspor ke AS memang hanya menyumbang sekitar 2% PDB (setara Rp460–Rp509 triliun per tahun, namun komoditas tersebut terutama produk padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kehilangan pangsa pasar senilai 2% PDB dapat menimbulkan efek domino besar pada penyerapan tenaga kerja, permintaan domestik, dan pendapatan masyarakat. Pengaruh lebih signifikan lagi adalah potensi kehilangan investasi asing langsung (PMA) yang selama ini mendorong kapasitas produksi dan ekspor. Setiap tahunnya, PMA di Indonesia mencapai sekitar Rp3.300 triliun (15–16% dari PDB).

Selain menambah kapasitas, PMA berperan dalam penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan penguatan rantai nilai lokal. Oleh karena itu, pelemahan arus PMA akibat pergeseran pengalih daya akibat tarif tinggi dapat memperbesar kontraksi output. Mengingat kerentanan ini, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak gabungan kebijakan tarif AS dan perubahan kerangka hukum investasi Indonesia terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pasca-2025, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mitigasi risiko tersebut.

Struktur dari sisa bagian artikel ini adalah sebagai berikut: Bagian 2 mengembangkan tinjauan pustaka. Bagian 3 menjelaskan metodologi penelitian. Bagian 4 menyajikan hasil dan pembahasan. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya pada Bagian 5.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa eskalasi perang dagang global telah memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. IMF (2025) mencatat bahwa tarif efektif AS telah melonjak ke level tertinggi sejak era Depresi Besar [8]. Analisis IMF juga memperkirakan bahwa penambahan tarif AS menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2025 dari sekitar 3,6% menjadi hanya 2,8%, serta memperlambat pertumbuhan perdagangan dunia menjadi sekitar 1,7% [8].

Studi Nugroho et al. (2021) menemukan bahwa perang dagang AS–Tiongkok dapat meningkatkan pendapatan riil dan menurunkan kemiskinan melalui alih dagang, meski dapat



memperlebar ketimpangan sosial [8]. Lawder dan Hunnicutt (2025) mencatat bahwa kebijakan tarif tersebut merupakan bagian dari pendekatan proteksionis baru yang dapat mengguncang rantai pasok internasional [7].

Relokasi rantai pasok menjadi sorotan penting. Sejak perang dagang AS–China, investasi manufaktur asing lebih banyak mengalir ke Vietnam. Indeks Kemudahan Berbisnis 2020 menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dunia, jauh di bawah Malaysia (15), Thailand (27), dan Vietnam (69). INDEF mencatat sistem perizinan Indonesia belum terintegrasi antara pusat dan daerah, berbeda dengan Vietnam yang lebih efisien. Wicaksono (2021) menunjukkan bahwa UU Penanaman Modal Indonesia dan Vietnam memiliki tujuan serupa tetapi berbeda dalam struktur kelembagaan [3]. Pengalaman Vietnam dalam merevisi UU Investasi sejak 1986 menunjukkan pentingnya reformasi regulasi untuk menarik FDI.

Malaysia juga memberikan kemudahan dengan kepemilikan asing penuh di banyak sektor dan insentif fiskal menarik. Literatur lain menekankan pentingnya diplomasi ekonomi, yaitu perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan dan promosi internasional. Secara keseluruhan, literatur menyarankan diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan kemudahan investasi sebagai kunci memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi gangguan eksternal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Metodologi kuantitatif meliputi simulasi makroekonomi dengan model keseimbangan umum (misalnya CGE dinamis) untuk memproyeksikan dampak perubahan tarif AS dan pergeseran FDI terhadap PDB, ekspor, dan investasi Indonesia pada periode 2025–2030. Variabel input dalam model mencakup tarif impor AS, tarif balasan mitra dagang, pertumbuhan ekonomi global, serta tren permintaan komoditas utama.

Model ini juga menganalisis efek ganda (multiplier) dari investasi domestik. Secara kualitatif, penelitian ini mengevaluasi perubahan regulasi investasi domestik, termasuk pembaharuan UU Penanaman Modal dan penyederhanaan One-Stop Shop (OSS). Analisis komparatif dilakukan terhadap kerangka hukum investasi Vietnam dan Malaysia (misalnya kepemilikan asing penuh dan insentif yang diberikan). Data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, WTO, dan lembaga penelitian (seperti INDEF dan World Bank) digunakan untuk mendukung parameter dan validasi hasil model [2].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulasi menunjukkan pertumbuhan PDB moderat pasca-2025. FokusEkonomi (2025) melaporkan pertumbuhan 5,0% [9], dan proyeksi 2025 tetap sekitar 4,7–5,0%. Kuartal I-2025 mencatat 4,87% [4]. BI menurunkan proyeksi global 2025 menjadi 2,9% [5]. Penurunan ekspor dapat diredam oleh konsumsi domestik dan investasi infrastruktur. Penurunan global ini sebagian menekan ekspor Indonesia, namun kontraksi ekonomi domestik dapat dibendung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur yang kuat.

Meskipun demikian, ekspektasi tarif tinggi diperkirakan sedikit menurunkan ekspor nasional. Analisis BNP Paribas memperkirakan dampak tarif hanya 0,1–0,5 poin terhadap PDB



ASEAN, Indonesia relatif tahan karena ekspor yang beragam [10]. Produk rentan: sawit, tekstil, alas kaki, furnitur [6]. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16.970/USD akibat pengumuman tarif AS [6]. Survei Ipsos menunjukkan lonjakan minat terhadap emas sebagai lindung nilai [11].

Diversifikasi pasar ekspor (misalnya meningkatkan ekspor energi ke Asia) dan pelemahan rupiah relatif dapat meredam sebagian dampak. PMA tetap tumbuh 12,7% pada kuartal I-2025 mencapai US\$13,7 miliar, terutama dari sektor pertambangan dan pemurnian [4]. Investasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap hilirisasi dan stabilitas ekonomi jangka menengah.

Di sektor keuangan, gejolak global mendorong arus modal ke aset aman. *Commentary* oleh Channel NewsAsia (2025) mencatat nilai tukar rupiah sempat jatuh ke level terendah sepanjang sejarah (sekitar Rp16.970/USD pada 9 April 2025) saat pasar bereaksi terhadap pengumuman tarif AS [6]. Pelemahan ini memang meningkatkan daya saing relatif ekspor Indonesia di kawasan, namun juga menimbulkan kekhawatiran. BI melaporkan terjadi net outflow investor asing dari pasar saham dan obligasi Indonesia senilai sekitar US\$1,8 miliar sepanjang 2025 (s/d Mei) [6]. Menghadapi volatilitas, masyarakat cenderung mencari instrumen aman: survei Ipsos (April 2025) menunjukkan tingginya minat investasi emas karena nilai tukar rupiah yang lemah [11].

Secara umum, simulasi menunjukkan bahwa efek tarif tinggi dapat menurunkan pertumbuhan tahunan PDB sekitar 0,1–0,5 poin persentase (misalnya pada beberapa negara ASEAN). Sementara itu, penurunan 10–20% aliran PMA diperkirakan mengurangi PDB Indonesia tambahan sekitar 0,5–1,2% setelah memperhitungkan efek pengganda (multiplier effect).

Dampak sosialnya serius karena sektor padat karya menyerap jutaan tenaga kerja: misalnya, sektor makanan–minuman, tekstil–pakaian, alas kaki, dan furnitur mempekerjakan ~12,2 juta orang atau 8,4% total pekerja. Penurunan ekspor industri padat karya ini berpotensi memicu PHK massal. Kondisi keuangan yang tidak pasti (volatilitas rupiah dan pasar modal) juga dapat membuat investor menunda ekspansi.

Di sisi positif, beberapa faktor fundamental tetap mendukung Indonesia. Sebagai negara dengan pasar domestik besar dan sumber daya alam melimpah, Indonesia masih menarik minat PMA. Pada kuartal I-2025, PMA tumbuh 12,7% (yoY) menjadi US\$13,7 miliar, terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan pemurnian logam (23% dari total PMA) [4]. Hal ini menunjukkan investor tetap optimis terhadap prospek hilirisasi sumber daya.

Selain itu, penerapan kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur yang ekstensif menopang permintaan dalam negeri, sehingga ekonomi relatif tahan banting. Upaya penyederhanaan perizinan melalui OSS dan rencana UU Penanaman Modal baru juga membuka peluang sektor yang sebelumnya tertutup bagi investor asing. Dalam perbandingan kelembagaan, Indonesia masih memiliki tantangan: walaupun UU Penanaman Modal baru memangkas *negative list*, implementasinya masih perlu perbaikan koordinasi pusat-daerah. Vietnam, misalnya, terus-menerus merevisi undang-undang investasinya sejak 1986, menjadikannya salah satu pusat manufaktur ASEAN. Malaysia juga memberikan kepemilikan asing penuh di banyak sektor strategis dan insentif fiskal menarik. Oleh karena itu, Indonesia perlu meniru praktik terbaik tersebut untuk meningkatkan daya saing investasi domestik.

Tabel 1 menyajikan ringkasan struktur PDB Indonesia selama 2021–2024 dalam triliun rupiah dan persentase terhadap PDB berdasarkan Data PDB dan komponen pengeluaran diperoleh



dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi PDB Indonesia (2021–2024), proporsi PMA dan PMDN berdasarkan realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM dan Nilai ekspor total dan ekspor ke AS diolah dari Kementerian Perdagangan dan GoodStats. Sebagai catatan bahwa sebagian data dalam tabel di atas merupakan hasil olahan dan estimasi peneliti berdasarkan sumber resmi, karena tidak semua data tersedia dalam format yang langsung mencerminkan struktur PDB.

Nilai ekspor ke Amerika Serikat, misalnya, dikonversi dari laporan nilai ekspor dalam mata uang dolar AS dengan menggunakan kurs rata-rata tahunan yang diperoleh dari Bank Indonesia. Demikian pula, pembagian investasi ke dalam PMA dan PMDN didasarkan pada proporsi realisasi investasi yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM, lalu disesuaikan terhadap nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDB. Langkah ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan relevan mengenai struktur ekonomi Indonesia dalam konteks dampak kebijakan tarif Amerika Serikat.

Tabel 1

Ringkasan struktur PDB Indonesia selama 2021–2024 dalam triliun rupiah

| Tahun | Konsumsi (C) | | Investasi (I) | | | | Konsumsi Pemerintah(G) | | Ekspor (X) | | | | Impor (M) | | PDB (Y) |
|-------|--------------|-----|---------------|-----|-------|-----|------------------------|----|------------|-----|-----|----|-----------|-----|---------|
| | | | PMA | | PMDN | | | | Non-US | | US | | | | |
| 2021 | 9.669 | 57% | 2.635 | 16% | 2.593 | 15% | 1.570 | 9% | 2.850 | 17% | 460 | 3% | 2.807 | 17% | 16.970 |
| 2022 | 11.494 | 59% | 3.088 | 16% | 2.609 | 13% | 1.608 | 8% | 3.721 | 19% | 512 | 3% | 3.444 | 18% | 19.588 |
| 2023 | 12.644 | 61% | 3.211 | 15% | 2.917 | 14% | 1.556 | 7% | 3.448 | 17% | 434 | 2% | 3.318 | 16% | 20.892 |
| 2024 | 13.069 | 59% | 3.356 | 15% | 3.098 | 14% | 2.000 | 9% | 3.594 | 16% | 509 | 2% | 3.487 | 16% | 22.139 |

Komponen investasi (I) terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang secara total menyumbang sekitar 29% dari PDB. PMA mengambil porsi antara 15%–16%, sementara PMDN berkisar 13%–15%. Pada tahun 2024, nilai PMA mencapai sekitar Rp3.356 triliun, mencerminkan peran penting investasi asing dalam mendorong pertumbuhan kapasitas produksi nasional. Namun, struktur investasi ini juga mengindikasikan ketergantungan terhadap modal asing, khususnya dalam sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PMA yang berperan dalam ekspor ke Amerika Serikat (AS) cenderung bersifat *assembling-based* dan sangat sensitif terhadap perubahan tarif perdagangan.

Ekspor barang (X) mengalami pertumbuhan nominal dari Rp3.310 triliun pada 2021 menjadi Rp4.103 triliun pada 2024, namun dari sisi kontribusi terhadap PDB, porsi ekspor terhadap total output nasional relatif stagnan di kisaran 19%–20%. Dari jumlah tersebut, ekspor ke AS hanya berkontribusi sekitar 2%–3% dari total PDB, yakni setara Rp460 triliun pada 2021 dan mencapai Rp509 triliun pada 2024. Meskipun secara persentase tampak kecil, ekspor ke AS sangat strategis karena menyangkut sektor manufaktur padat karya, yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investor asing.

Jika ekspor ke pasar AS terganggu akibat tarif tinggi seperti kebijakan Trump, maka efeknya tidak hanya akan berdampak pada penurunan ekspor, tetapi juga dapat memicu relokasi investasi PMA ke negara-negara pesaing yang memperoleh perlakuan tarif lebih rendah. Sementara itu, konsumsi pemerintah (G) berkisar antara 7% hingga 9% dari PDB, relatif stabil dalam nominal



namun dengan kontribusi yang sedikit menurun secara proporsional dibandingkan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Adapun impor (M) sebagai pengurang dalam struktur pengeluaran, juga tumbuh seiring peningkatan permintaan domestik dan bahan baku industri, dengan kontribusi sekitar 16%–18% dari PDB tiap tahunnya.

Tabel ini memberikan landasan kuantitatif untuk mengidentifikasi titik-titik kerentanan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal berupa kebijakan tarif proteksionis. Terlihat jelas bahwa ekspor ke AS dan investasi PMA bukan hanya dua komponen yang langsung terdampak, melainkan juga saling terkait erat satu sama lain. Gangguan terhadap salah satunya dapat menimbulkan efek domino terhadap PDB secara keseluruhan.

Data ekspor Indonesia menunjukkan bahwa nilai ekspor barang ke Amerika Serikat pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp508 triliun, atau setara dengan kurang lebih 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp22.139 triliun. Secara nominal, kontribusi sebesar 2% terhadap PDB mungkin terlihat kecil. Namun dalam konteks struktur ekonomi nasional, angka ini memiliki arti strategis. Amerika Serikat merupakan pasar ekspor non-Asia terbesar bagi Indonesia, dan ekspor ke negara tersebut didominasi oleh produk manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan komponen elektronik. Sektor-sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi penggerak konsumsi rumah tangga di daerah-daerah industri.

Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan impor oleh pelaku usaha Amerika ke negara pesaing akibat tarif tinggi terhadap Indonesia, maka kehilangan pasar senilai 2% dari PDB dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang tidak kecil, apalagi jika disertai efek lanjutan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, dampak jangka panjang yang jauh lebih signifikan justru berasal dari potensi kehilangan investasi asing langsung atau Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data yang disusun dalam penelitian ini, nilai PMA yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya diperkirakan mencapai sekitar Rp3 ribuan triliun, atau setara dengan 15% - 16% dari total PDB. PMA tidak hanya berperan sebagai penambah kapasitas produksi nasional, tetapi juga merupakan pendorong utama bagi ekspor, penciptaan lapangan kerja, peningkatan transfer teknologi, dan penyerapan input domestik dari sektor industri kecil dan menengah.

Jika perusahaan-perusahaan asing memutuskan untuk memindahkan investasi mereka dari Indonesia ke negara lain yang tidak dikenakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat, maka potensi kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan efek dari kehilangan ekspor secara langsung.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tarif proteksionis AS era Trump berpotensi memperlambat ekspor Indonesia dan pertumbuhan global, sehingga menekan prospek ekonomi domestik pasca-2025. Simulasi dan data terkini memperlihatkan pertumbuhan PDB Indonesia tetap moderat sekitar 4,7–5,0% per tahun hingga 2025–2026 [9], asalkan konsumsi dalam negeri dan investasi domestik tetap kuat. Sektor sumber daya alam dan industri hilir berorientasi ekspor bernilai tambah tinggi harus dioptimalkan untuk memitigasi tekanan eksternal. Berdasarkan temuan penelitian ini, kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia perlu diarahkan sebagai berikut:



1. Reformasi Regulasi Investasi: Mempercepat pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal baru dan integrasi kebijakan pusat-daerah agar proses perizinan lebih cepat dan transparan. Menerapkan perizinan terpadu (*one-stop*) dan menyederhanakan *negative list* sektor. Meningkatkan kepastian hukum melalui perlindungan investasi yang kuat dan penegakan kontrak secara konsisten.
2. Diversifikasi Pasar Ekspor: Mengembangkan ekspor non-tradisional dan mencari pasar alternatif di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk ekspor unggulan (sawit, tekstil, elektronik, otomotif) agar lebih kompetitif. Memperkuat kerja sama perdagangan regional (misalnya penguatan RCEP, IPEF, ASEAN) untuk mengamankan dan memperluas pangsa pasar.
3. Diplomasi Ekonomi Proaktif: Mengintensifkan diplomasi perdagangan dan investasi, termasuk negosiasi tarif melalui forum WTO dan dialog bilateral. Pendekatan ini mirip upaya Vietnam yang membahas penghapusan tarif AS 46% melalui jalur diplomasi (Hada, 2025). Pemerintah juga perlu aktif mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi strategis melalui roadshow dan insentif.
4. Penguatan Sektor Domestik: Meningkatkan investasi infrastruktur (transportasi, logistik, digital) dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat rantai nilai domestik. Kebijakan fiskal dan moneter harus mendukung stabilitas makroekonomi (inflasi, nilai tukar, suku bunga rendah) guna menjaga kepercayaan investor.
5. Kebijakan Akomodatif: Melanjutkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal (melunak ketentuan TKDN, keringanan tarif impor mesin produksi) untuk sektor strategis. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan klaster industri untuk meningkatkan daya tarik bagi PMA.
6. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak perdagangan global sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- BNP Paribas Economic Research. (2025, April 4). *Which ASEAN countries are most vulnerable to the hike in US tariffs?* Eco Insight, BNP Paribas.
- FocusEconomics. (2025, February 5). *Indonesia: Economy ends 2024 on a high note.* FocusEconomics.
- International Monetary Fund. (2025, April 22). *The global economy enters a new era.* IMF.
- Ipsos. (2025, April). *Impact of US Tariff on Indonesia: A Glimpse into the Reaction and Impact of Tariff Wars in Indonesia.* Ipsos.
- Lawder, D., & Hunnicutt, T. (2025, April 5). *US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms.* Reuters.
- Medina, A. F. (2025, May 7). *Indonesia's Q1 2025 FDI Growth: Mining and Smelting Sectors Lead the Surge.* ASEAN Briefing.
- Nugroho, A., Hill, H., & Achmadi, A. (2021). *Does the US–China trade war increase poverty in a developing country? (A CGE analysis for Indonesia).* Economic Modelling, 99, 279–297.



Santia, T. (2025, April 23). *BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,9%, Imbas Perang Dagang*. *Liputan6.com*.

Tanuwidjaja, E. (2025, May 23). *Commentary: Weak rupiah could benefit Indonesia in Trump's trade war*. *Channel NewsAsia*.

Wicaksono, D. (2021). *Analisis perbandingan hukum penanaman modal asing Indonesia dengan Vietnam*. *JAIS (Jurnal Administrasi Investasi Syariah dan Strategis)*, 2(1), 7–23.

World Bank. (2019). *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. World Bank.